



**IMPLIKASI PENGIRIMAN KONTINGEN GARUDA KE VIETNAM  
TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TAHUN 1973 – 1975**

**Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Menyusun Skripsi Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:  
Tri Sutrisno Rahayu  
NIM. 13030114120005**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Tri Sutrisno Rahayu, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 31 Agustus 2018

Penulis,



Tri Sutrisno Rahayu

NIM 13030114120005

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### *MOTTO*

“Ikatlah Ilmu dengan Menuliskannya”

-Ali Bin Abi Thalib-

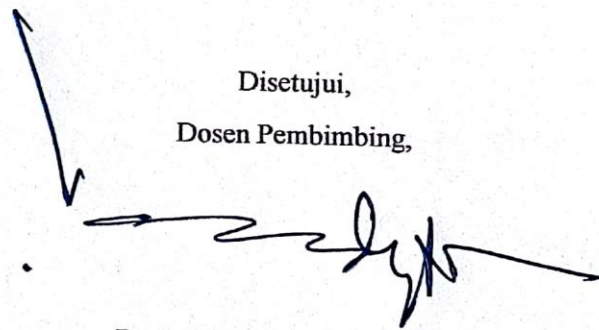
“Selalu ada yang tersembunyi dibalik jiwa seseorang. Tak selamanya yang kau lihat sama seperti sebenarnya terjadi. Kesedihan, amarah, harapan yang pupus, merupakan sebuah bagian dari proses yang tak mungkin bisa kau hindari. Aku mengalaminya juga, dan coretatan dalam catatan-catatan ini mewakili segalanya”

-Risa Sarasvati-

Dipersembahkan untuk :

1. Ku persembahkan untuk almamter tercinta jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.
2. Kepada para guru dan dosen yang telah meluangkan waktu untuk mendidik dan mengajarkanku segala ilmu dan jasmu tak terlupakan.
3. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, yang tidak kenal lebih dalam mendidik hingga dewasa.
4. Kepada semuanya yang aku sayangi. Terima kasih untuk seluruh cinta yang diberikan.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end. To the left of the signature, there is a checkmark symbol.

Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.  
NIP 19640711 199001 1 001

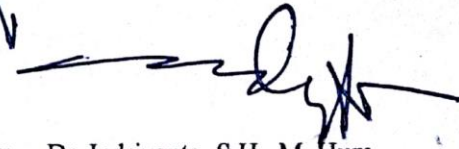
Skripsi dengan judul "Implikasi Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 1973-1975" yang disusun oleh Tri Sutrisno Rahayu (13030114120005) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Jum'at, 31 Agustus 2018.

Ketua,



Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.  
NIP 19640626 198903 1 003

Anggota I,



Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.  
NIP 19640711 199001 1 001

Anggota II,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.  
NIP 19610605 198603 2 001

Anggota III,



Dra. Titiek Suliyati, M.T.  
NIP 19561219 198703 2 001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Rebyanto Noor, M. Hum.  
NIP 19590307 198603 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmaanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya atas kuasa dan kehendak-Nya, skripsi yang berjudul “Implikasi Pengiriman Kontingen Garuda Ke Vietnam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 1973 – 1975’ dapat terselesaikan sebagai syarat utama untuk menyelesaikan studi pada Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat : Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh , M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Mulyono, M.Hum., selaku dosen wali, yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademi penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum., Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., dan Dra. Titiek Suliyati, M.T., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah fakultas Ilmu Budaya universitas diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi departemen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal. Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Tatang Kurniawan dan Supiah, yang telah memberikan kasih

sayang, dukungan, dan dorongan yang begitu besar kepada penulis. Terima kasih juga untuk kakaku dan saudara-saudaraku yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada para teman yang telah mendukung penulis, untuk Wavin Nuha Kuntanaka, Muhammad Syahrianto, Safe, Hendri Mulyawan, Muhammad Sugiarto, Rangga, Pradipta Nugraha, Amir, Doni, Nizar, Yayan, Erik, Arifin, Umam, Dicky, Try, Bayu, Wawan Wiyanto, Prayogo Widodo, Roberto, Taufik, Fijar, Aldi, Akmal dan teman-teman kelas A, B, dan C Departemen Sejarah Angkatan 2014. Terima kasih juga penulis haturkan untuk Jumiatin, Listiya Nur Hidayah, Astri, Lulu, Omah, Iit, Wiwit, Umi, Nia, Tiyak, Nanda, Eka, Widya Ayu, yang telah berbagi cerita dengan penulis lewat obrolan-obrolan ringannya yang membuat tertawa dan tersenyum. Terima kasih penulis haturkan kepada seluruh teman-teman di Departemen Sejarah yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebersamaannya selama ini. Serta penulis haturkan terima kasih kepada Muhimmatul Aliyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, atas dukungan personalnya terhadap penulis yang telah begitu perhatian dan sangat memahami penulis lewat celoteh maupun keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini dan hal-hal pribadi lainnya. Semoga skripsi ini menjadi bukti bahwa kesuksesan dapat diraih bersama, walaupun terpisahkan oleh jarak.

Sebagai peneliti pemula, skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, semua saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan pembelajaran serta bagi manusia-manusia yang haus akan ilmu pengetahuan.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika penulis melakukan hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak.

Sebagai akhir kata, penulis mengutip suatu kalimat yang dituliskan oleh dr. Priguna Sidharata : *aku telah merangkai karangan bunga dari bunga-bunga milik orang lain, dan tiada setangkai pun hanya tali yang mengikat bunga-bunga itu saja, adalah milikku.*

Semarang, 31 Agustus 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvii
<b>ABSTRAK</b>	xviii
<b><i>ABSTRACT</i></b>	xix
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sitematika Penulisan	19
<b>BAB II           KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI</b>	
<b>INDONESIA 1973-1975</b>	22
A. Politik Indonesia Bebas Aktif	22
B. Keikutsertaan Indonesia dalam Perdamaian Dunia	28
1. Kebijakan Politik Indonesia Terhadap PBB	28
2. Pengiriman Pasukan Perdamaian Dunia 1973-1975	29
3. Kebijakan Politik Indonesia Terhadap ASEAN	31
C. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia	
Terhadap Indocina	33
1. Konflik Indocina	33
2. Konflik Vietnam	34
3. Perang Vietnam	45
4. Peran Indonesia dalam Konflik Indocina	52

<b>BAB III</b>	<b>KONTINGEN GARUDA KE VIETNAM 1973-1975</b>	55
	A. Latar Belakang Penugasan Kontingen Garuda	55
	B. Terbentuknya ICCS	60
	C. Kontingen Garuda IV	63
	1. Peristiwa Lao Bao	69
	2. Pengaruh Peristiwa Lao Bao	71
	D. Kontingen Garuda V	74
	1. Kegiatan Kontingen Garuda V Di Vietnam	75
	2. Tugas Penyerahan Tawanan Perang (POW dan Observasi Peperangan di Gia Lai	78
	E. Kontingen Garuda VII	82
	F. Penarikan Kontingen Garuda dari Vietnam	83
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLIKASI PENGIRIMAN KONTINGEN GARUDA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 1973-1975</b>	87
	A. Posisi Indonesia di PBB	89
	B. Posisi Indonesia di ASEAN	96
	C. Hubungan Indonesia dan Vietnam	100
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN</b>	122
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	124
	<b>LAMPIRAN</b>	133

## DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
AU	: Angkatan Udara
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nations</i>
Dephankam	: Departemen Pertahanan dan Keamanan
Dandenkes	: Komandan Detasemen Kesehatan
Deplu	: Departemen Luar Negeri
DK	: Dewan Keamanan
ECOSOS	: <i>Economic and Social Council</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
JMC	: <i>Joint Military Commision</i>
KPI	: Komite Pengawas Internasional
KONGA	: Kontingen Garuda
ICCS	: <i>Internasional Commision of Control and Supervision</i>
Misriga	: Misi Republik Indonesia Garuda
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NEFOS	: <i>New Emerging Forces</i>

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POW	: <i>Prisoners of War</i>
PRG	: <i>Provosional Revolutionary Goverment of the Republic of South Vietnam</i>
RAPWI	: <i>Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Interness</i>
RDV	: Republik Demokrasi Vietnam
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RRC	: Republik Rakyat Cina
RV	: Republik Vietnam
Satgas	: Satuan Tugas
SEATO	: <i>Southeast Asia Treaty Organization</i>
TNI-AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNCI	: <i>United Nations Commisioner for Indonesia</i>
UNDPKO	: <i>United Nation Departemen of Peace Keeping Operations</i>
UNEF	: <i>United National Emergency Force</i>
UNOC	: <i>United Nation Operation in the Congo</i>
UNTEA	: <i>Nations Temporary Excutive Authority</i>
UNTSO	: <i>United Nations Truce Supervision Organization</i>
USA	: <i>United State America</i>
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945

## DAFTAR ISTILAH

- Bangkok Declaration* : Persetujuan yang ditandatangani oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama regional.
- Bank of Indochina* : Bank yang didirikan di Prancis pada 21 Januari 1875 untuk beroperasi di Indocina, seluruh Asia, dan Pasifik.
- Cochincina* : Nama yang digunakan untuk berbagai wilayah selatan Vietnam.
- De facto* : Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara berdasarkan pada kenyataan yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara.
- De jure* : Pengakuan terhadap sebuah negara secara resmi berdasarkan hukum internasional.
- Franc* : Mata uang Prancis.
- French Compagnie des Indes Orientales* : Organisasi perdagangan Prancis yang mengatur perdagangan di Timur Jauh.
- Free School of Tonkin* : Lembaga pendidikan yang bertujuan mereformasi masyarakat Vietnam di bawah kolonialisme Prancis selama awal abad ke-20.
- Integrasi* : Pelaksanaan tugas-tugas ICCS organisasi dan pembinaan meliputi bidang-bidang politik, hukum, dan militer.
- International Colonial Institute* : Lembaga Hukum Kolonial Internasional untuk mengatur hukum stempay agar mendapat tempat yang sama dalam hukum kolonial.
- Joint Communique* : Perjanjian antara Dewan Keamanan Indonesia dengan Vietnam Utara yang memperlihatkan pemerintah Indonesia yang bersimpati dengan perjuangan negara-negara pro komunis.

- Joint Military Commision* : Komisi Militer Bersama untuk mencegah dan mengetahui berbagai pelanggaran dalam bidang gencatan senjata, dan penyerahan tawanan perang.
- Ho Chi Minh Understandin* : Komitmen antara Indonesia dan Vietnam dalam rangka menyelesaikan konflik antara Vietnam dengan Kamboja.
- Marxisme* : Sebuah paham berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik.
- Military Cooperation* : Kerja sama di bidang militer.
- Nhan Dan* : Agensiberita Vietnam Utara yang terbit setiap hari.
- Nasionalisme* : Rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang menjadi daya dorong bangsa dalam memperjuangkan cita-cita bersama.
- Point of Entry* : Team Khusus yang dibentuk oleh organisasi ICCS yang bertugas membantu dalam melakukan negoisasi mengenai masalah politik, hukum, militer.
- Public Works Services* : Proyek infrastruktur yang luas, dibiayai, dan dibangun oleh pemerintah
- Republic of Vietnam* : Sebutan untuk negara Vietnam Selatan yang berideologi liberal.
- Peace Keeping Forces* : Pasukan Pemelihara Perdamaian yang dibentuk oleh PBB.
- Peace Keeping Operation* : Operasi yang dikembangkan oleh PBB untuk membantu mengawasi dan menyelesaikan konflik bersenjata melalui pembentukan pasukan perdamaian PBB.
- Session* : Badan tertinggi ICCS yang menentukan kebijaksanaan ICCS.
- Sociètè des Missions* : Organisasi yang didirikan untuk melakukan

<i>Entrangeres</i>	misi penyebaran Katholik Roma
<i>Team Regional</i>	: Team pelaksana operasional ICCS di bidang regional
<i>The New York Agreement</i>	: Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1962 berisi tentang upaya penyelesaian sengketa Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda.
<i>Track Record</i>	: Rekam jejak secara keseluruhan untuk tujuan membuat keputusan.
<i>Vietcong</i>	: Organisasi politik dan militer yang berbasis di Vietnam Selatan pada saat Perang Vietnam dan bersekutu dengan Vietnam Utara untuk melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan Vietnam menjadi satu.
<i>Vietnam Courier</i>	Surat Kabar Vietnam Utara yang terbit setiap minggu.
<i>Viet Nam Quoc Dong Dong</i>	: Partai yang berasal dari kalangan orang-orang terdidik dan dalam perkembangannya menjadi radikal, banyak aksi-aksi kekerasan dilancarkannya dan berseberangan dengan komunis.
<i>World Federation of Small and Weak Nations</i>	: Organisasi yang didirikan dan diprakarsai oleh Uni Soviet untuk menghimpun negara-negara beraliran komunis.

---

Catatan:

1. Kamus Besar Indonesia dalam Jaringan,” (<http://pusatbahasa.diknas.go.id>., diunduh pada 27 Juli 2018).
2. Mohamad Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta: Haji Masagung, 1987).
3. Frank N. Trager, *Why Vietnam?* (New York : Frederick A. Preager Publisher, 1966)
4. Virgia Thompson, *French-Indochina* (London : George Allen dan Unwin Ltd, 1937).

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar:	
2.1 Peta Negara Vietnam. . . . .	34
3.1 Peta Situasi di Vietnam Selatan dalam Peristiwa Lao Bao. . . . .	69
3.2 Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1973 oleh Anggota Kontingen Garuda V . . . . .	76
3.3 Pertandingan olah raga antara Kontingen Garuda Indonesia dengan Prajurit Vietnam dalam rangka mempererat persahabatan . . . . .	76
3.4 Team POW ( <i>Prisoners of War</i> ) Penyerahan Tawanan Perang . . . . .	78
3.5 Peta Vietnam Selatan, Daerah Gia Lai ditandai Garis Lingkar Merah . . . . .	80

---

5. Dinas Sejarah TNI AD, *Dharma Bhakti TNI-AD Dalam Tugas Internasional* (Bandung : Dinas Sejarah TNI AD, 1983).



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran:	
Keputusan Presiden No. 28 tahun 1973 .....	133
Biografi Ruslan Abdulgani, “ Surat Pengunduran R.I dari Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2/38/65/6” .....	139
Biografi Ruslan Abdulgani, “Indonesia Kembali ke PBB dan Situasi Dunia Pada Umumnya” .....	141
Biografi Ruslan Abdulgani, “The Foreign Servise of Vietnam” .....	147
Biografi Ruslan Abdulgani, “President Ho Chi Minh’s Letter to President Sukarno” .....	148
Nama-nama Anggota Kontingen Garuda ke Vietnam .....	151

## ABSTRAK

Melalui metode sejarah, yaitu heuristik berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah yang kemudian diuji keaslian sumber dan kredibilitas sumber yang diinterpretasikan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial, sehingga dapat dipaparkan secara kronologis menjadi tulisan sejarah. Skripsi ini mengkaji Implikasi Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 1973-1975. Penelitian menggunakan pendekatan politik luar negeri yang menitikberatkan terhadap hubungan-hubungan dengan negara lain baik melalui birokrasi pemerintah maupun militer. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perebutan kekuasaan di Vietnam membawa ketegangan di Asia Tenggara. Prancis menguasai Vietnam pada akhir 1800-an. Selama menguasai Vietnam gaya kepemimpinannya adalah kolonialisme totaliter, sehingga mengakibatkan tumbuhnya berbagai gerakan nasionalis anti Prancis. Prancis mengatur Vietnam sampai tahun 1940, ketika Jepang menduduki selama Perang Dunia II. Setelah Jepang menyatakan kekalahannya, Prancis mencoba untuk mendapatkan kembali kontrol dari Vietnam. maka Pertempuran pecah antara pasukan Prancis dan Vietnam. Untuk mengakhiri konflik, maka diadakan perjanjian di Jenewa, Swiss pada tahun 1954 yang membagi wilayah Vietnam menjadi dua, tetapi konflik masih terus berlanjut, hingga pada akhirnya pada tahun 1973 diadakan Perjanjian Paris. Konflik di Vietnam tersebut Hal mendorong pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah Vietnam dengan membentuk Pasukan Kontingen Garuda. Terdapat tiga pertanyaan penelitian yang dikaji yaitu pertama bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia tahun 1973-1975?, kedua bagaimana latarbelakang pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam?, dan ketiga bagaimana implikasi pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam terhadap politik luar negeri Indonesia tahun 1973-1975?.

Pengiriman Kontingen Garuda merupakan wujud nyata dari penerapan politik Indonesia yang Bebas dan Aktif berdasarkan pada amanat UUD 1945. Dalam hal ini Indonesia membantu menyelesaikan konflik Vietnam dengan mengirimkan Kontingen Garuda. Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam dilakukan pada tahun 1973-1975 terdiri dari Garuda IV, V, dan VII. Selanjutnya melalui pengiriman Kontingen Garuda, Indonesia mendapat implikasi citra positif di dunia internasional yaitu posisi Indonesia semakin kuat di lingkup PBB terutama pada tahun 1974 Indonesia terdaftar dalam lembaga-lembaga PBB seperti FAO dan ILO, posisi Indonesia semakin kuat di lingkup ASEAN terutama pada tahun 1975 Indonesia mendapat kepercayaan menjadi mediator penyelesaian konflik antara Vietnam dan Kamboja, dan hubungan Indonesia dan Vietnam semakin erat ditandai dengan Indonesia membantu Vietnam untuk bergabung menjadi anggota ASEAN.

## **ABSTRACT**

*Historical methods, namely heuristics in the form of historical sources which are then incorporated into credibility and resources that can be interpreted using social science concepts and theories, can be explained chronologically into historical writing. This thesis examines the Implications of Shipping the Garuda Contingent to Vietnam Against Indonesian Foreign Policy in 1973-1975. Research uses a state political approach that focuses on relations with other countries through government and military bureaucracies. The background of this research is that the struggle for power in Vietnam has brought tension in Southeast Asia. France ruled Vietnam in the late 1800s. As long as mastering Vietnam the style of leadership was totalitarian colonialism, resulting in various anti-French nationalist movements. France formed Vietnam until 1940, examining Japan during World War II. After Japan declared its defeat, Australia tried to return from Vietnam. Then the battle between French and Vietnamese troops. To disagree, then an agreement was held in Geneva, Switzerland in 1954 which divided Vietnam's territories into two, but still continued, until finally in 1973 after the Paris Agreement. Conflict in Vietnam Puree the Indonesian government in a peaceful context to help the parties to the dispute to find a Vietnamese solution with the provisions of the Garuda Contingent Force. There are three research questions that are studied, namely the first how Indonesia's foreign policy in 1973-1975?, the two ways the background of sending the Garuda Contingent to Vietnam?, and the third way of sending the Garuda Contingent to Vietnam against Indonesian foreign policy in 1973-1975?.*

*The sending of the Garuda Contingent is a tangible manifestation of Free and Active Indonesian political application based on the mandate of the 1945 Constitution. In this case Indonesia helped resolve the Vietnam conflict with the term Garuda Contingent. Delivery of the Garuda Contingent to Vietnam was carried out in 1973-1975 consisting of Garuda IV, V and VII. Furthermore, through the sending of the Garuda Contingent, Indonesia received positive image implications in the international world, namely Indonesia's stronger position at the UN UN in 1974 Indonesia was included in UN UN agencies such as the FAO and ILO, Indonesia's position became stronger in ASEAN ASEAN in 1975 Indonesia got trust is a mediator of the conflict between Vietnam and Cambodia, and the relations between Indonesia and Vietnam are very relevant to Indonesia helping Vietnam to join ASEAN.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Sejarah Indonesia tidak hanya membicarakan tentang perjuangan nasional saja tetapi juga membicarakan tentang perjuangan internasional. Indonesia mencoba menunjukkan eksistensinya melalui berbagai diplomasi dan peranannya dalam menanggulangi berbagai masalah global seperti hak asasi manusia, imigrasi, perang, dan prasangka diskriminasi.<sup>1</sup>

Peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik luar negeri yaitu politik luar negeri bebas dan aktif.<sup>2</sup> Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sejalan dengan itu politik luar negeri Indonesia mengacu pada politik luar negeri bebas aktif yang semata didasarkan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan benegara.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya pertikaian di dunia menimbulkan konflik salah satunya konflik yang disebabkan kolonialisme. Semenjak mengalami Revolusi

---

<sup>1</sup>Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 610.

<sup>2</sup>Mohamad Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 1-2.

<sup>3</sup>Parulian Simamora, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. (Jakarta: PT Graha Ilmu, 2013), hlm. 22.

Industri banyak negara Eropa melakukan ekspansi untuk membentuk imperium baru. Hal ini yang mendasari kolonialisme di wilayah Asia Tenggara termasuk salah satunya adalah kawasan Indocina. Indocina merupakan sebutan negara jajahan Prancis di Wilayah Asia Tenggara yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja. Istilah Indocina mengacu pada pengaruh budaya India dan Tiongkok dalam budaya wilayah tersebut. Awal kedatangan Prancis ke negara Indocina adalah pada awal abad ke 17. Kepentingan yang dibawa Prancis ke Indocina adalah untuk melakukan perdagangan dan penyebaran agama Katolik.<sup>1</sup>

Prancis mempunyai dinamika tersendiri di wilayah Indocina. Di Vietnam, Prancis berhasil melakukan paksaan terkait masalah Tiongkok yang menutup diri dari dunia luar dan agama Katolik. Namun demikian, pada akhirnya Prancis berhasil menaklukkan Vietnam setelah kemenangannya dalam perang Tiongkok-Prancis. Selama menguasai Vietnam, Prancis melebarkan kekuasaannya ke Laos dan Kamboja. Dinamika Prancis dengan Kamboja diawali dengan ketakutan Prancis atas ekspansi yang dilakukan Inggris dan Siam akan aksesnya di Sungai Mekong. Pada tahun 1870 Prancis mendesak untuk mendapat kontrol yang lebih besar atas urusan internal Kamboja. Kamboja mendapat kemerdekaannya pada tahun 1953. Pada tahun 1963 Prancis membujuk Raja Norodom, yang adalah raja Kamboja pada saat itu untuk menandatangani perjanjian yang memberi Prancis kontrol atas urusan luar negeri Kamboja. Selanjutnya Prancis menguasai secara penuh negeri Kamboja. Berlanjut pada dinamika Prancis di Laos, ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Siam dari Thailand ke arah timur laut mengundang protes dari Prancis yang saat itu berkuasa atas Vietnam. Prancis pun mengadakan negoisasi dengan Bangkok untuk menentukan perbatasan Siam-Vietnam. pada perkembangan selanjutnya Prancis akhirnya dapat menguasai Laos. Prancis

---

<sup>1</sup>“Chapter 1 The French In Indochina” ([http://www.digitalhistory.uh.edu/unit12\\_1](http://www.digitalhistory.uh.edu/unit12_1) diunduh pada 19 Desember 2017).

mengklaim Laos sebagai negara Indocina di bawah kekuasaannya. Ketika Jepang mengambil alih Laos pada Maret 1945, Laos pun mendapat kemerdekaannya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya konflik dan perang di wilayah Indocina berlangsung sejak tahun 1954 hingga 1975 yang merupakan peperangan terkejam yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Peperangan tersebut terjadi di wilayah Vietnam yang menjalar ke negara tetangga yaitu Laos dan Kamboja. Konflik dan perang tersebut berimbas terhadap situasi politik di Indonesia yang mengakibatkan meletusnya peristiwa yang dinamakan “Gerakan 30 September 1965. Imbas dari konflik Vietnam di Indonesia karena pengaruh ideologi penyebaran ideologi komunis. Penyebaran ideologi komunis didalangi oleh Uni Soviet dengan menjaring para tokoh-tokoh negara atau pemuda-pemuda yang cerdas untuk menyebarkan paham komunis. Di Indonesia, salah satu tokoh yang terkenal adalah D.N. Aidit dan di Vietnam yaitu Ho Chi Minh.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya perang di wilayah Vietnam merupakan akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berpengaruh ke Asia Tenggara. Hal ini membuat Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan yang mendapat pengaruh dari Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang mendapat pengaruh dari Uni Soviet. Daerah Vietnam Selatan (*Republic of Viet Nam*) adalah daerah yang tidak mempunyai dukungan karena tidak mampu bertahan apabila tidak adanya dukungan dari Prancis. Berlanjut daerah Vietnam Utara merupakan daerah delta sungai Mekong yang subur untuk pertanian. Vietnam Utara sangat mudah mendapatkan dukungan karena bertumpu pada negara-negara yang mempunyai pengaruh yang sama yaitu ideologi Komunis. Keinginan Vietnam Utara untuk menyatukan Vietnam membuat negeri itu dilanda peperangan. Amerika Serikat yang tidak ingin komunis menguasai

---

<sup>2</sup>Chalder, David P., “Cambodia-Tai and Vietnamese Hegemony” (<http://www.britannica.com/place/Cambodia/Tai-and-Vietnamese-Hegemony>, diunduh pada 19 Desember 2017).

<sup>3</sup>Henk Schulte Nordholt’, “Masa Depan Cerah, Bahaya Menunggu: Negara-Bangsa Baru dan Kekerasan Massal di Asia Tenggara”, *Jurnal Sejarah Lembar Sejarah* Vol. XI No. 2 (Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014), hlm. 115-116.

Vietnam memutuskan untuk mengirim pasukan. Vietnam tidak boleh dikuasai oleh komunis karena daerah tersebut merupakan batu loncatan untuk memperluas pengaruh Amerika Serikat ke Asia Tenggara.<sup>4</sup>

Perang Vietnam yang terjadi antara tahun 1957-1975 merupakan perang yang besar sepanjang sejarah karena perang ini terhitung perang dalam kurun waktu terlama antara Vietnam dengan Amerika Serikat. Perang ini berintikan perang memperjuangkan kemerdekaan Vietnam dari sikap anti asing.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya untuk membantu konflik di Vietnam, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian atau Kontingen Garuda. Hal ini dilatarbelakangi kedekatan Indonesia dan Vietnam sebagai negara yang bertetangga. Sebelum pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam, Pengiriman Kontingen Indonesia pertama kali adalah pada masa Soekarno tahun 1957 dengan Kontingen Garuda I yang dikirim ke Mesir. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1960-1962, Indonesia juga berpartisipasi dalam penyelesaian konflik di Afrika yaitu di wilayah Kongo dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang diberi nama Kontingen Garuda II dan Kontingen Garuda III. Selanjutnya pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam.<sup>6</sup>

Perkembangan selanjutnya kredibilitas tinggi Indonesia di mata PBB tahun 1973 memang tengah mencapai puncaknya. Kepercayaan PBB terhadap Indonesia tercermin dengan ditunjuknya Mayor Jendral H. R. Darsono, sebagai ketua delegasi Indonesia untuk membantu dan mengakhiri perang Vietnam 1973-1975.<sup>7</sup> Perkembangan kondisi di Vietnam yang semakin memburuk akibat Perang Vietnam membuat diadakannya perundingan di Paris untuk mengakhiri dan meredakan konflik di Vietnam. Sebagai wujud pelaksanaan perjanjian itu maka

---

<sup>4</sup>Dinas Sejarah TNI AD, *Garuda V di Vietnam Selatan 1973-1974* (Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1974), hlm. 69.

<sup>5</sup>Ruslan Abdulgani, *Asia Tenggara di Tengah Raksasa Dunia* (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1978), hlm. 5.

<sup>6</sup>Hariato, "Tentara Indonesia", dalam *Kompas*, 19 September 1999.

<sup>7</sup>J. S. Harianto, "Tentara Indonesia dan PBB", dalam *Kompas*, 19 September 1999.

dibentuklah ICCS (*International Commission of Control and Supervision*) yang menjadi komisi untuk menaungi Pasukan Indonesia (Kontingen Garuda IV, V, dan VII) menjalankan tugas di Vietnam.<sup>8</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam ICCS berawal dari pernyataan Presiden Soeharto kepada utusan Istimewa Presiden Amerika Serikat, D.R. Henry Kissinger di Brussel pada tanggal 22 November 1972, selanjutnya secara resmi Indonesia menerima permintaan Amerika Serikat untuk duduk dalam ICCS, disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 24 Januari 1973, selain itu juga Indonesia mendapat permintaan yang sama dari Pemerintah Vietnam Utara melalui Duta Besar Indonesia di Hanoi tanggal 23 Januari 1973 dengan tujuan ingin ikut serta dalam menyelesaikan masalah sengketa di Vietnam, dan memberikan sumbangan positif untuk membantu menciptakan perdamaian secepatnya di Vietnam.<sup>9</sup>

Ketika mendapat kepercayaan bertugas di Vietnam, tahun 1973, TNI (ABRI) mengapresiasi kepercayaan tersebut dengan mengirimkan Kontingen Garuda. Tugas dari Kontingen Garuda merupakan tugas yang sangat luhur untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dunia khususnya di Vietnam yang dipercayakan kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang selama ini banyak mengambil peranan penting di antara negara-negara ASEAN lainnya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan itu kepercayaan yang diberikan oleh Vietnam dijalankan dengan baik oleh Indonesia, mengingat hubungan baik antara Indonesia dengan Vietnam terjalin dengan baik. Selanjutnya Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda IV pada tanggal 28 Januari 1973 dilanjutkan dengan pengiriman Kontingen Garuda V pada tanggal 21 Juli 1973, dan dilanjutkan Kontingen

---

<sup>8</sup>Dinas Sejarah TNI AD, *Dharma Bhakti TNI-AD Dalam Tugas Internasional* (Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1983), hlm. 114.

<sup>9</sup>Markas Besar ABRI. *Sejarah Singkat Perjuangan ABRI*. (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1990), hlm. 102.

<sup>10</sup>“Garuda IV tiba di Saigon”, dalam *Suara Merdeka*, 28 dan 29 Januari 1973.



Garuda VII diberangkatkan pada tanggal 6 Agustus 1974. Tugas dari Kontingen Garuda adalah mengawasi gencatan senjata sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian Paris dan ICCS sebagai naungan dalam bertugas.<sup>11</sup>

Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam memberikan dampak terhadap politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia tetap konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Melalui Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam menjadikan Indonesia mendapat dukungan politik luar negeri yang semakin meningkat. Kepercayaan demi kepercayaan diperoleh Indonesia pasca pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1975 posisi-posisi penting diduduki Indonesia dalam lembaga-lembaga PBB yaitu anggota dari ILO (*International Labour Organization*), dan FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*). Pada tahun 1975 di tingkat Asia Tenggara, Indonesia yang berpartisipasi dalam penyelesaian konflik Vietnam membuat Indonesia mendapat kepercayaan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja pada akhirnya perang Vietnam. Selain itu, hubungan Indonesia dan Vietnam semakin baik dan saling mendukung satu sama lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang Pengiriman Kontingen Garuda Ke Vietnam dan implikasi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia tahun 1973-1975. Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu;

1. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia tahun 1973-1975?
2. Bagaimana latar belakang pengiriman kontingen garuda ke Vietnam 1973-1975 dan mengapa kontingen garuda ditarik dari Vietnam pada tahun 1975?
3. Bagaimana implikasi pengiriman kontingen garuda ke Vietnam terhadap politik luar negeri Indonesia tahun 1973-1975?

---

<sup>11</sup>Dinas Sejarah TNI AD, *Dharma Bhakti TNI-AD Dalam Tugas Internasional* (Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1983), hlm. 202.

<sup>12</sup>Shambazy Budiarto, "Peranan Indonesia dalam Percaturan dan Perdamaian Dunia", dalam *Kompas*, 08 Januari 1995.

## **B. Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup dalam penulisan karya sejarah merupakan hal yang sangat penting. Pembatasan ini merupakan tujuan untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Ruang lingkup dalam penulisan ini meliputi ruang lingkup spasial, temporal, dan keilmuan.

Ruang lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup nasional. Hal ini didasarkan pada alasan pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam tentunya mempunyai dampak terhadap politik luar negeri Indonesia yang mencakup isu nasional seperti kebijakan luar negeri, politik dan ekonomi nasional. Fakta-fakta dan proses-proses yang berkaitan dengan pengiriman Kontingen Garuda terhadap politik luar negeri Indonesia dapat disebut bersifat dan berskala nasional, atau dengan meminjam istilah Sartono Kartodirdjo, merupakan “fakta-fakta di tingkat makro” dan “proses-proses di tingkat makro”.<sup>13</sup>

Lingkup temporal merupakan kurun waktu yang menjadi objek penelitian. Penulis mengambil lingkup temporal pada tahun 1973 sampai 1975. Adapun alasan pemilihan tahun 1973 karena pada tahun ini konflik lokal berkembang menjadi perang dalam skala besar di wilayah Vietnam serta invasi Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tindakan Amerika tersebut ternyata membawa malapetaka. Pada tahun 1973 reaksi Indonesia mengancam tindakan Amerika. Indonesia mulai mempersiapkan pasukan sebagai bantuan untuk mengatasi konflik di Vietnam dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Vietnam. Pada tahun 1973 mulai mengirimkan Kontingen Garuda IV pada tanggal 28 Januari. Pada tanggal 28 Juli 1973 Kontingen Garuda Indonesia mengakhiri

---

<sup>13</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosia dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 75.

tugasnya dan digantikan oleh Kontingen Garuda Indonesia V. Keberhasilan Kontingen Garuda V dilanjutkan oleh Kontingen Garuda VII.<sup>14</sup>

Adapun batas akhir dari penulisan skripsi ini adalah tahun 1975, karena merupakan selesainya tugas dari Kontingen Garuda meskipun keadaan di Vietnam semakin memburuk, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan menarik anggotanya kembali ke tanah air secara bertahap. Dengan ditariknya pasukan Kontingen Garuda di Vietnam, berakhirilah tugas Kontingen Garuda di Vietnam, pada bulan Juni 1975.

Lingkup keilmuan skripsi ini adalah ilmu sejarah dengan konsentrasi pada kajian sejarah politik luar negeri. Kajian sejarah politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai sejarah kerja sama dengan negara lain dan interaksi dengan negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa hal yang dapat dibahas dalam sejarah politik luar negeri, misalnya kepentingan negara dan ideologi bangsa, diplomasi. Deskripsi dalam sejarah politik luar negeri juga mencakup aksi, reaksi dan interaksi negara-negara tertentu yang dikaji, misalnya dengan menghubungkan konteks sosial, politik, ekonomi seperti susunan dan kebijakan masing-masing negara, keadaan hubungan internasional pada waktu itu, organisasi sosial dan ekonomi masing-masing negara.<sup>15</sup>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

*Pertama* menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia. *Kedua*, menjelaskan latar belakang pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam dan penarikan Kontingen Garuda dari Vietnam. *Ketiga*, menganalisis implikasi

---

<sup>14</sup>Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI IV 1960-1980* (Bandung: Pusat Sejarah TNI, 2000), hlm. 205-208.

<sup>15</sup>Muhammad Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta: Haji Masugung, 1987), hlm. 5.

pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam terhadap Politik Luar Negeri Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini perlu ditelaah kajian-kajian atau hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga memperjelas posisi ilmiah atas kajian dalam skripsi ini terhadap kajian-kajian yang terkait dan sudah dilakukan sebelumnya.

Pustaka yang *pertama* yang digunakan penulis untuk tinjauan pustaka ini berjudul “Dharma Bhakti TNI-AD dalam Tugas Internasional”.<sup>16</sup> Buku ini berisi tentang peranan TNI AD dalam mengemban tugas internasional. Buku ini membahas tugas-tugas internasional TNI-AD seperti membantu RAPWI tahun 1945 yang merupakan tugas internasional yang pertama. Selain itu tugas-tugas internasional dalam rangka perdamaian dunia yaitu dharma bhakti di Mesir, dharma bhakti di Kongo, dharma bhakti di Vietnam, dan Dharma Bhakti di Timur Tengah.<sup>17</sup>

Relevansi pustaka tersebut bagi penulisan skripsi ini terletak pada BAB Dharma Bhakti di Vietnam. Pada bagian ini membahas Perang Vietnam Utara-Selatan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, akhirnya menemui penyelesaian setelah diadakan Perjanjian Paris. Untuk pelaksanaan isi perundingan ini, PBB mengirimkan pasukan-pasukan yang tergabung dalam organisasi dunia guna mengawasinya. Indonesiapun diminta bantuannya dalam hal ini. Berdasarkan mukadimah UUD 1945 serta politik luar negeri yang Bebas Aktif, akhirnya Indonesia membentuk Misi Republik Indonesia Garuda atau Kontingen Garuda dalam rangka menyelesaikan konflik di Vietnam.

---

<sup>16</sup>Dinas Sejarah TNI AD, *Dharma Bhakti TNI-AD Dalam Tugas Internasional* (Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1983).

<sup>17</sup>Sejarah TNI AD, *Dharma Bhakti TNI-AD*, hlm. 1-3.

Kelebihan dari buku ini adalah memenuhi semua syarat historiografi, ilmiah, tersusun rapi, memenuhi hampir semua standar baku; berita, dan beberapa surat keputusan yang bertautan dengan masalahnya. Buku ini disusun dengan metode diskriptif dengan berstandar pada sumber-sumber tertulis berupa dokumen, arsip, buku-buku, majalah, surat kabar serta penerbitan-penerbitan lainnya untuk menjaga keotentikan fakta-fakta yang dikemukakan.

Perbedaan pustaka tersebut dengan skripsi ini terletak pada pembahasannya. Secara umum pustaka pertama ini pembahasan hanya difokuskan pada dharma bhakti TNI dalam tugas internasional di berbagai negara tanpa membahas pengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia. Selain itu politik luar negeri Indonesia jelas mempunyai tujuan tersendiri selain ikut campur dalam menyelesaikan konflik di Vietnam tetapi juga berhubungan baik dengan negara-negara besar yang ikut campur dalam konflik Vietnam. Hal ini tidak dijelaskan dalam pustaka ini, sedangkan skripsi ini memfokuskan terhadap pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam sekaligus implikasinya terhadap politik luar negeri Indonesia.

Pustaka *kedua* berjudul “Garuda V 1973-1974”.<sup>18</sup> Pustaka ini merupakan kumpulan arsip-arsip yang dibukukan. Buku ini membahas tentang segala kegiatan dan tugas Kontingen Garuda V dalam Misi Republik Indonesia Garuda sebagai anggota ICCS di Vietnam Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kontingen Garuda V menjalin persahabatan dengan rakyat untuk meringankan penderitaan mereka. Kedekatan ini terlihat dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan secara bersama-sama seperti pelaksanaan olahraga, sumbangan natal, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Kelebihan dari pustaka ini adalah dikemukakan foto-foto dari seluruh pejabat anggota Garuda V yang bertugas pada Misrifa di Saigon. Selain itu

---

<sup>18</sup>Dinas Sejarah TNI AD, *Garuda V di Vietnam Selatan 1973-1974* (Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1974).

<sup>19</sup>Sejarah, *Garuda V*, hlm. 69.

pustaka ini menampilkan kegiatan sejak dari perekrutan anggota sampai seluruh tugas Garuda V sebagai anggota ICCS di Vietnam Selatan, dan daftar nama dan alamat seluruh anggota Garuda V sebagai tali penghubung seluruh anggota yang selama bertugas di Vietnam. Kekurangan dari pustaka ini adalah terbatasnya jumlah halaman, sehingga masih banyak hal-hal yang belum dicantumkan.

Relevansi pustaka ini dengan penulisan skripsi terletak pada penyajian gambaran secara umum kegiatan dari Garuda V selama bertugas di Vietnam yang tentunya merupakan tugas mulia dan terhormat kepada anggota Garuda V oleh Negara, Pemerintah, dan Rakyat Indonesia. Secara lebih luas pustaka ini memberikan pengetahuan mengenai penugasan Kontingen Garuda di Vietnam. Hal ini diperlukan untuk memahami penugasan kontingen Garuda ke Vietnam 1973-1975.

Perbedaan pustaka tersebut dengan skripsi ini adalah pembahasan dari pustaka ini hanya memfokuskan pada tugas Kontingen Garuda V dan tidak memfokuskan secara keseluruhan Kontingen Garuda IV, V, dan VII. Pada skripsi ini memfokuskan secara keseluruhan tugas dari Kontingen IV, V, dan VII. Selain itu, penjelasan dalam pustaka ini lebih banyak menggunakan foto-foto dan keterangan-keterangan yang singkat. Hal ini tentunya membuat pustaka ini tidak kronologis dalam fokus pembahasannya. Pada skripsi ini fokus penjelasan yang kronologis dalam pembahasan pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam.

Pustaka yang *ketiga* adalah artikel William H. Federick “Seperti Saudara; Revolusi Indonesia dan Vietnam; Sebuah Perbandingan dalam buku Denyut Nadi Revolusi Indonesia”<sup>20</sup> yang diterbitkan PT Gramedia bekerjasama dengan Program Studi Asia Tenggara. Artikel ini membahas tentang persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Vietnam dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Hal ini tentu penting untuk mengetahui awal hubungan Indonesia dan Vietnam mengingat Indonesia membantu menyelesaikan konflik melalui pengiriman Kontingen Garuda. Selain itu artikel ini mengkomparasikan revolusi di Indonesia

---

<sup>20</sup>Williah H. Federick, *Seperti Saudara Revolusi Indonesia dan Vietnam; Sebuah Perbandingan: Denyut Nadi Revolusi Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 1997).

dengan Vietnam dan kepemimpinan Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh yang membuat hubungan Indonesia dan Vietnam dekat.<sup>21</sup>

Kelebihan dari pustaka ini adalah menjelaskan perbandingan sejarah Indonesia dan Vietnam dari berbagai aspek seperti aspek geografi, etnis dan bahas. Segi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan, sedangkan Vietnam adalah negara daratan. Segi etnis Indonesia lebih beragam mengenai budaya, sedangkan Vietnam lebih homogen. Sementara itu yang terpenting faktor kepemimpinan Ir. Soekarno dari Indonesia dan Ho Chi Minh dari Vietnam memiliki peranan besar dalam revolusi kemerdekaan. Hal ini cukup penting untuk mengetahui gambaran mengenai Indonesia dan Vietnam sebagai acuan untuk mengetahui implikasi dari hubungan kedua negara. Kekurangan dari pustaka ini adalah lebih menonjolkan sejarah Indonesia dibandingkan dengan sejarah Vietnam. Artinya perbandingan tentang sejarah Indonesia lebih banyak dibahas dibandingkan dengan sejarah Vietnam sendiri.

Relevansi pustaka dengan penulisan skripsi ini terletak pada penyajian sejarah Indonesia dan Vietnam yang dilihat dari kacamata perbandingan. Selain itu penyajian perwujudan politik antara Indonesia dan Vietnam menambah wawasan tentang sejarah kotemporer Indonesia, khususnya mengenai Revolusi Indonesia. Hal ini mampu memberikan gambaran sejarah awal hubungan Indonesia dengan Vietnam yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

Pustaka yang *keempat* adalah artikel “Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vietnam 65 tahun Pembangunan dan Perkembangan”.<sup>22</sup> Artikel ini diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2010 untuk memperingati 65 tahun hubungan Indonesia dan Vietnam. artikel ini membahas tentang kebijakan

---

<sup>21</sup>Federick, *Seperti Saudara*, hlm 400.

<sup>22</sup>Kementerian Luar Negeri, *Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vietnam 65 tahun Pembangunan dan Perkembangan* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2010).

pembangunan dan perkembangan Indonesia dan Vietnam, ideologi dan kepemimpinan dari Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh.<sup>23</sup>

Kelebihan pustaka ini adalah penjelasan mengenai hubungan Indonesia dan Vietnam dalam aspek pembangunan dan perkembangan. Pembangunan dan perkembangan ini dimulai pasca kemerdekaan baik kemerdekaan Indonesia maupun kemerdekaan Vietnam. Dalam hal ini hubungan antara Indonesia dan Vietnam dimulai dari kedekatan antara Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh pada tahun 1959. Kedekatan tersebut membuat Indonesia dan Vietnam saling mendukung satu sama lain. Kekurangan dari pustaka ini penjelasan hubungan Indonesia dan Vietnam ditonjolkan pada masa Orde Lama sedangkan masa Orde Baru penjelasannya sangat singkat.

Relevansi pustaka dengan penulisan skripsi ini terletak pada penyajian tentang kedekatan Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh. Kedekatan Ini dimulai ketika Ho Chi Minh berkunjung ke Indonesia pada tahun 1959. Kunjungan ini menurut Ir Soekarno menambah erat hubungan antara Indonesia dan Vietnam. Pembahasan tersebut menjadi acuan untuk mengetahui perkembangan hubungan Indonesia dan Vietnam yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

Pustaka yang *kelima* adalah artikel yang berjudul “Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional” yang ditulis oleh Widya Noventari dari Universitas Gajah Mada.<sup>24</sup> Artikel ini membahas mengenai ketahanan nasional yang menjadi kajian amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini kemudian digunakan untuk menentukan arah dan strategi dari suatu negara dalam pencatutan kehidupan politik internasional. Indonesia telah menentukan posisinya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, dimana dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia tidak terpengaruh oleh campur tangan negara lain. Salah satu hal yang diutamakan dalam politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia adalah

---

<sup>23</sup>Kementerian Luar, *Hubungan Diplomatik*, hlm. 25.

<sup>24</sup>Widya Noventari, “Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional” (<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5522> diunduh pada 19 Desember 2017).



kekuatan diplomasi yang tidak bisa terlepas dari kekuatan kekuasaan, pemerintahan, dan angkatan perang (militer) dalam memperkuat ketahanan nasional dan menjaga stabilitas nasional.

Kelebihan dari pustaka ini adalah memberikan gambaran dan pengetahuan umum mengenai konsep ketahanan nasional menuju stabilitas nasional serta peran dari angkatan perang (militer) dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdampak terhadap politik luar negeri Indonesia dan stabilitas nasional. Kekurangan dari artikel ini terletak dari kurang banyaknya halaman sehingga penjelasannya masih sangat singkat.<sup>25</sup>

Relevansi pustaka ini dengan penulisan skripsi terletak pada gambaran umum mengenai peranan diplomasi dan angkatan perang dalam mewujudkan stabilitas nasional. Hal ini diperlukan untuk memahami angkatan perang (militer) sebagai penyeimbang dalam hubungan diplomatik antara negara-negara di dunia untuk saling menjaga perdamaian dan keadilan dunia.

Berbeda dengan pustaka tersebut yang hanya membahas diplomasi angkatan perang secara umum tanpa adanya spesifik yang berkaitan dengan kontingen Garuda, sedangkan skripsi ini fokus memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam dan implikasi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menerangkan pengertian-pengertian atau konsep dasar tentang topik yang diangkat dalam penulisan ini. Menyoroti mengenai “Implikasi Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam terhadap Politik Luar Negeri Indonesia tahun 1973-1975” diperlukan konsep, teori dan pendekatan yang relevan dengan tema yang diangkat. Perangkat metodologi ini dibutuhkan untuk menjadikan skripsi ini tidak saja sebagai sejarah deskriptif naratif, tetapi yang lebih penting adalah sebagai sejarah ilmiah, sehingga refleksi dari isi skripsi lebih bersifat

---

<sup>25</sup>Noventari, “Peran Diplomasi”, hlm. 122.

deskriptif analitis. Dalam melakukan analisis, diperlukan perangkat yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam menganalisis peristiwa yang terjadi.<sup>26</sup>

Pemerintah Indonesia berusaha mengupayakan partisipasi dalam penghentian konflik di Vietnam yang berlangsung lama. Pemerintah Indonesia pun melakukan politik luar negeri dengan mengirimkan Kontingen Garuda. Pembicaraan tentang politik luar negeri dibahas terlebih dahulu tentang pengertian politik luar negeri. Martin Griffith dan Terry O Callaghan mengatakan bahwa politik luar negeri merupakan proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan Internasional.<sup>27</sup> Dengan perkataan lain politik luar negeri sebagai implementasi dari kebijakan politik yang dilakukan suatu negara. Kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi konflik di Vietnam adalah melalui diplomasi militer, yang merupakan bagian dari politik luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia.<sup>28</sup>

Politik luar negeri dengan menggunakan diplomasi militer diartikan sebagai aplikasi damai yang dilakukan suatu negara dengan sumber daya dari seluruh pertahanan yang dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan. Diplomasi militer ini merupakan bagian dari hal tersebut yang cenderung untuk merujuk pada berperannya atas pertahanan dan aktivitas pertahanan yang terkait. Peran atas pertahanan bukan merupakan operasi kontra pemberontakan, tetapi yaitu keterlibatan tingkat tinggi militer dalam hal ini menteri pertahanan dan personel senior pertahanan, pelatihan dan latihan militer, reformasi, sistem keamanan, pertahanan, regional dan forum keamanan atau pembicaraan staf militer secara

---

<sup>26</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 2.

<sup>27</sup>Martin Griffith, Terry O Callaghan, *International Relations: The Key Concepts* (London: Routledge, 2002), hlm. 79.

<sup>28</sup>Eduardo Lachica, "Jakarta Foray Into Armed Diplomacy" *Journal International Relations* Vol 170 No. 5 (The Far Eastern Economic Review, 2007), hlm. 57-69.

bilateral. Dengan kata lain politik luar negeri menggunakan diplomasi militer merupakan alat kebijakan politik luar negeri melalui militer secara damai.<sup>29</sup>

Penempatan pasukan Indonesia di Vietnam untuk menjadi pasukan perdamaian PBB merupakan salah satu langkah dari politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi militer. Hal ini yang menjadi alasan diplomatik Indonesia dengan misi utamanya adalah memulai secara serius bagaimana dapat menggunakan posisi Indonesia dalam PBB untuk menyelesaikan konflik di Vietnam. Melalui politik luar negeri, semua komponen seperti militer, dan birokrasi pemerintahan terlibat dalam kebijakan politik luar negeri ke Vietnam.

Politik luar negeri pada tataran ini, TNI sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri dinilai sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-undang. Selanjutnya diplomasi yang dilakukan oleh TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri dalam menyelesaikan konflik di berbagai dunia.

Wujud implementasi dari diplomasi yang dilakukan TNI adalah pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam. Kontingen Garuda adalah rombongan pasukan militer yang dikirim untuk bergabung dengan kelompok yang lebih besar.<sup>30</sup> Kontingen Garuda juga merupakan pasukan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi dan mengawasi konflik bersenjata. Kiprah para prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda ke Vietnam memainkan peran diplomasinya melalui berbagai pendekatan baik dengan masyarakat di Vietnam maupun dengan sesama pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari negara-negara lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik Vietnam.

Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam memberikan implikasi terhadap Indonesia. Implikasi adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif

---

<sup>29</sup>Eduardo Lachica, “*Jakarta Foray*” *Journal International Relations*, hlm. 6-7.

<sup>30</sup>Kamus Besar Indonesia dalam Jaringan,” (<http://pusatbahasa.diknas.go.id>., diunduh pada 27 Juli 2018)..

maupun negatif).<sup>31</sup> Implikasi disini merupakan dampak atau konsekuensi dari Kontingen Garuda ke Vietnam terhadap politik luar negeri Indonesia.<sup>32</sup> Implikasi ini yang sentiasa membuat Kontingen Garuda mempunyai daya tarik tersendiri karena selaras dengan pemikiran politik luar negeri yaitu interaksi global yang tetap mengutamakan perdamaian sekalipun terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda yang mendatangkan dampak positif terhadap Indonesia. Implikasi dari pengiriman Kontingen Garuda diperoleh dari diplomasi militer yang dilakukan TNI. Diplomasi militer masuk dalam kategori diplomasi publik, argumentasi ini diambil dari salah satu teori Paul Sharp yang mengatakan bahwa diplomasi publik merupakan suatu proses hubungan langsung dengan masyarakat di suatu negara guna memperjuangkan kepentingan nasional dan dalam rangka menyebarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Dalam hal ini melalui diplomasi militer TNI meningkatkan *image* Indonesia. Melalui pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam, Indonesia mendapat dukungan, kepercayaan dan rasa hormat masyarakat internasional terhadap bangsa dan negara Indonesia di forum-forum dunia seperti PBB dan ASEAN.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam hal ini Kontingen Garuda sebagai sebuah pasukan perdamaian PBB yang membantu mengawasi dan menyelesaikan konflik bersenjata. Pengiriman Kontingen Garuda merupakan penyeimbang antara diplomasi sebagai otaknya dan peranan Garuda sebagai raganya yang menggerakkan untuk mempertahankan stabilitas nasional Indonesia terutama melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Skripsi ini mencoba menjelaskan apakah penugasan Kontingen Garuda ke Vietnam dapat dikatakan memberi dampak terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sebelum itu, skripsi ini juga menyoroti penugasan Kontingen Garuda ke Vietnam

---

<sup>31</sup>“Kamus Besar”.

<sup>32</sup>“Kamus Besar”.

<sup>33</sup>Dudy, S.H., Singadilaga MPA, *Politik Luar Negeri Indonesia : Suatu Essai Populer* (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 16.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>34</sup> Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), interpretasi, dan penulisan (historiografi).<sup>35</sup>

Dalam skripsi ini, sumber-sumber yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sejarah TNI AD, Museum Satria Mandala, Perpustakaan KODAM IV/ Diponegoro, Pusat Data Kompas, dan Pusat Data Arsip Suara Merdeka.

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan penulisan skripsi ini adalah Arsip Surat Kabar sejaman dan Arsip TNI AD yang diperoleh di Museum Satria Mandala seperti Kompas, Suara Merdeka, dan Pelita Harapan.

Sumber sekunder diperoleh dengan cara melakukan riset kepustakaan yang berupa bahan karya ilmiah dan buku karya para sarjana dan ahli yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Sumber sekunder digunakan untuk melengkapi data yang tidak ditemukan dari sumber primer dalam rangka yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Setelah pengumpulan sejarah dipandang cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber melalui kritik eksteren dan intern.<sup>36</sup> Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentitas dan keaslian sumber. Oleh karena banyak dokumen yang dikeluarkan pihak militer merupakan salinan dari aslinya, maka harus dikolaborasikan dengan sumber lainnya. Langkah itu penting mengingat dokumen yang diragukan keasliannya akan mempengaruhi kredibilitasnya. Untuk itu, selain

---

<sup>34</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

<sup>35</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 35.

<sup>36</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 80-117.

dilakukan kritik ekstern juga dilakukan kritik intern untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya.

Tahap ketiga adalah kegiatan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan peristiwa pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam dan implikasi terhadap politik luar negeri Indonesia disentiskan melalui imajinasi, interpretasi, dan teorisasi untuk mencari hubungan satu fakta dan fakta lain dalam rangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dalam hal ini membanding-bandingkan informasi satu dengan yang lain dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang sah. Dengan demikian peristiwa Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam dan implikasi terhadap politik luar negeri Indonesia dapat dieksplenasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antara Penugasan Kontingen Garuda ke Vietnam dengan implikasi terhadap politik luar negeri Indonesia.

Tahap keempat adalah penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini fakta-fakta yang sudah diinterpretasikan dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah, kemudian disusun secara kronologis, komperhensif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dipahami dengan baik oleh para pembaca.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas latar belakang dari topik yang dibahas dan perumusan masalah; ruang lingkup meliputi lingkup spasial, temporal dan keilmuan. Lingkup spasial yang dibahas dalam skripsi ini adalah lingkup nasional, lingkup temporal yang dibahas adalah rentang waktu 1973-1975, tinjauan pustaka memuat buku dan literatur yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran berisi konsep-konsep dan teori yang dipakai; metode penelitian dan penggunaan sumber merupakan cara yang

dilakukan dalam menyusun skripsi ini dan terakhir berupa sistematika atau bentuk penulisan yang akan disajikan.

Bab II membahas kebijakan politik luar negeri Indonesia tahun 1973-1975. Pada bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu *Pertama* kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1973-1975 yang membahas tentang politik Indonesia yang bebas aktif, latar belakang lahirnya politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dipengaruhi beberapa faktor yaitu Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan pelaksanaan kebijakan politik bebas aktif. *Kedua* yaitu membahas tentang keikutsertaan Indonesia dalam perdamaian dunia meliputi kebijakan politik terhadap PBB, pengiriman pasukan perdamaian dunia tahun 1975-1973 yang dilakukan Indonesia, dan kebijakan politik Indonesia Terhadap ASEAN. *Ketiga* yaitu membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Indocina meliputi pembahasan mengenai konflik Indocina, selanjutnya pembahasan mengenai konflik Vietnam, pembahasan mengenai Perang Vietnam yang merupakan kelanjutan dari konflik Vietnam, dan yang tidak kalah penting adalah pembahasan mengenai peran Indonesia terhadap konflik Indocina khususnya Vietnam.

Bab III membahas mengenai Kontingen Garuda ke Vietnam tahun 1973-1975. Pada bab ini terdiri dari enam bagian yaitu *Pertama* membahas mengenai latar belakang pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam. *Kedua* membahas mengenai terbentuknya ICCS sebagai naungan dari Kontingen Garuda dalam bertugas di Vietnam. *Ketiga* membahas mengenai Kontingen Garuda IV yang merupakan pasukan perdamaian pertama yang dikirim ke Vietnam. Pada bagian membahas mengenai proses keberangkatan Kontingen Garuda IV, kegiatan Kontingen Garuda IV di Vietnam, dan proses penarikan Kontingen Garuda IV. *Keempat* membahas mengenai Kontingen Garuda V yang merupakan pasukan perdamaian kedua yang dikirim Indonesian ke Vietnam. Pada bagian ini pembahasannya sama mengenai proses pemberangkatan Kontingen Garuda V, kegiatan Kontingen Garuda V di Vietnam, dan proses penarikan Kontingen Garuda kembali ke tanah air. *Kelima* membahas mengenai Kontingen Garuda VII yang merupakan Kontingen Garuda terakhir yang dikirim ke Vietnam.

Pembahasan pada bagian ini sama dengan bagian sebelumnya meliputi proses pemberangkatan Kontingen Garuda VII, kegiatan Kontingen Garuda VII di Vietnam, dan proses penarikan Kontingen Garuda VII. *Keenam* membahas mengenai penarikan Kontingen Garuda dari Vietnam yang menandai berakhirnya tugas Kontingen Garuda.

Bab IV membahas mengenai implikasi atau dampak pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam terhadap Politik Luar Negeri Indonesia. Pada bagian ini terdiri tiga bagian. Bagian *Pertama* membahas mengenai posisi Indonesia di lingkup PBB pasca pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam meliputi hubungan antara Indonesia dengan PBB dan peranan Indonesia dalam PBB terhadap citra politik luar negeri Indonesia. *Kedua* posisi Indonesia di lingkup ASEAN pasca pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam meliputi hubungan Indonesia dengan ASEAN dan posisi Indonesia di ASEAN. *Ketiga* hubungan antara Indonesia dan Vietnam. pada bab ini membahas mengenai sejarah hubungan Indonesia dengan Vietnam, posisi Indonesia dimata Vietnam dan posisi Vietnam dimata Indonesia, serta hubungan Indonesia dengan Vietnam pasca pengiriman Kontingen Garuda dan pasca penyatuan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menjadi satu.

Bab V bab ini merupakan simpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang dibahas.